

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan negara. Dalam rangka mencapai target penerimaan perpajakan tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus menyusun berbagai strategi yang optimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Apabila terdapat tunggakan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengenakan sanksi administrasi berupa bunga dalam bentuk produk hukum STP Bunga Penagihan. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui proses penerbitan STP Bunga Penagihan, (2) mengetahui kesesuaian antara praktik penerbitan STP Bunga Penagihan dengan ketentuan yang berlaku, (3) mengetahui kendala dalam proses penerbitan STP Bunga Penagihan, dan (4) mengetahui alternatif solusi dalam mengatasi kendala pada proses penerbitan STP Bunga Penagihan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Objek penelitian adalah KPP Pratama Mataram Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) proses penerbitan STP Bunga Penagihan di KPP Mataram Barat terbagi menjadi 3 (tiga) proses utama yang terdiri dari pengumpulan persyaratan dan perlengkapan (*input*) STP Bunga Penagihan, penghitungan sanksi administrasi STP Bunga Penagihan, serta pembuatan Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan dan STP Bunga Penagihan; (2) penerbitan STP Bunga Penagihan di KPP Pratama Mataram Barat secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (3) kendala dalam proses penerbitan STP Bunga Penagihan disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu terdapat kesulitan dalam mengumpulkan persyaratan dan perlengkapan (*input*) serta terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penghitungan sanksi administrasi; dan (4) terdapat 2 (dua) alternatif solusi untuk mengatasi kendala dalam proses penerbitan STP Bunga Penagihan yaitu dengan membuat data-data yang dibutuhkan saling terhubung dan tersinkronisasi satu sama lain serta dengan menyediakan aplikasi yang dapat melakukan penghitungan secara otomatis atas sanksi administrasi STP Bunga Penagihan.

Kata kunci: Sanksi Perpajakan, Administrasi Bunga, STP Bunga Penagihan, Tunggakan Pajak, Utang Pajak

ABSTRACT

Taxes are one source of state revenue. The Directorate General of Taxation (DGT) must formulate optimal strategies to increase taxpayer compliance to achieve the tax revenue target. The low level of tax compliance causes tax arrears to arise. If tax arrears have not been paid up to the specified maturity date, The Directorate General of Taxation (DGT) can impose administrative sanctions in the form of interest in the form of an Interest Tax Billing Letter. This study aims to (1) find out the process of issuing an Interest Tax Billing Letter, (2) find out the suitability between the practice of issuing an Interest Tax Billing Letter and the applicable provisions, (3) find out the obstacles in the process of issuing an Interest Tax Billing Letter, and (4) find out alternative solutions in overcoming obstacles in the process of issuing an Interest Tax Billing Letter. The data collection method used in this study is a descriptive qualitative approach. Data collection techniques in this study consisted of interviews, observation, and literature studies. The object of research is The West Mataram Primary

Tax Service Office. The results of this study indicate that (1) the process of issuing an Interest Tax Billing Letter at West Mataram Primary Tax Service Office is divided into 3 (three) main processes consisting of collecting requirements and inputs for an Interest Tax Billing Letter, calculating administrative sanctions for an Interest Tax Billing Letter, and making a Note of the Calculation Interest Tax Billing Letter and an Interest Tax Billing Letter; (2) the issuance of an Interest Tax Billing Letter at West Mataram Primary Tax Service Office, in general, has complied with the applicable regulations; (3) obstacles in the process of issuing an Interest Tax Billing Letter are caused by 2 (two) things, the difficulties in gathering requirements and inputs as well as a possibility of errors in calculating administrative sanctions; and (4) there are 2 (two) alternative solutions to overcome obstacles in the process of issuing an Interest Tax Billing Letter, namely by making the required data connected and synchronized with each other and by providing applications that can perform automatic calculations of administrative sanctions for an Interest Tax Billing Letter.

Keywords: *Tax Sanctions, Interest Administration, Interest Tax Billing Letter, Tax Arrears, Taxes Payable*